

# PEMBEKALAN BUDAYA ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN EKONOMI BANGSA DI LINGKUNGAN SMA/MA/SMK TAPAKTUAN

Noval Suhendra <sup>\*1</sup>, Aglis Andhita Hatmawan<sup>2</sup>, Mutiara Shifa<sup>3</sup>, Desi Yuliana<sup>4</sup>,

Jalaluddin<sup>5</sup>, Mustakim<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar; Aceh Barat, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Teuku Umar; Aceh Barat, Indonesia

<sup>6</sup>Pascasarjana Universitas Malikussaleh

\*<sup>1</sup>novalsuhendra@utu.ac.id

## ABSTRAK

*Korupsi adalah perbuatan kejahatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengakar sehingga sering kali pemberitaan tentang penangkapan para koruptor sudah lumrah terdengar oleh masyarakat. Masalah yang terjadi saat ini adalah umumnya pelaku korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual atau memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena tersebut tentunya menodai lembaga pendidikan Indonesia karena bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri sehingga banyak pihak yang mempertanyakan kualitas pendidikan negara ini. Oleh karena itu salah satu tujuan dari pengabdian ini adalah sebagai langkah awal untuk mencegah pewarisan budaya korupsi dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi sekaligus penguatan karakter budaya anti korupsi di lingkungan pendidikan khususnya di jenjang SMA. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan pemaparan materi materi disertai pemutaran video berupa contoh kasus dan diakhiri dengan sesi diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei hingga 2 Mei 2023 di beberapa SMA sederajat di Tapaktuan dengan sasaran siswa kelas XII. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang tangguh dan tangguh serta tidak terpengaruh oleh praktik korupsi sehingga dapat berkontribusi bagi negara dengan menyelamatkan perekonomian bangsa dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.*

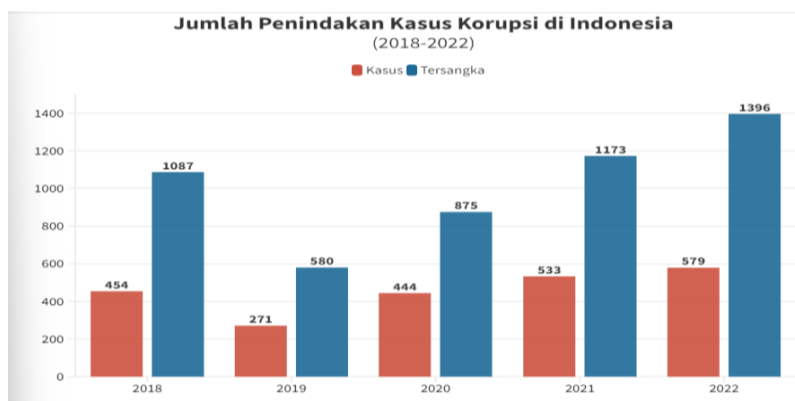
*Kata Kunci : Korupsi, Sekolah Menengah Atas, Budaya Anti Korupsi, Perekonomian Bangsa*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada, baik itu sosial, budaya dan juga agama. Di Indonesia sendiri kasus korupsi diibaratkan sebagai sebuah drama televisi yang terus berlanjut dan tidak pernah habis-habisnya. Jika dilihat dari keterlibatan birokrasi, hampir semua lini birokrasi pernah tersandung kasus korupsi dimulai dari kementerian, lembaga legislatif, perbankan, pemerintah daerah sampai kepada lembaga pendidikan.

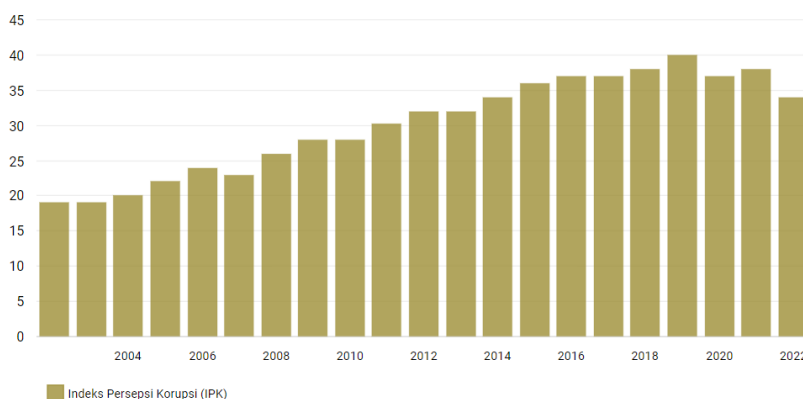
Berdasarkan data ICW (Indonesian Corruption Watch) sebagaimana yang dimuat di laman DataIndonesia.id (2023) tentang jumlah penindakan kasus korupsi di

Indonesia tahun 2018-2022, terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah penindakan kasus Korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 kasus yang berhasil ditindak adalah paling banyak dengan 579 kasus dan berhasil menetapkan 1396 orang tersangka. Apabila dirincikan kasus terbanyak terjadi di sektor desa dengan 155 kasus, diikuti sektor utilitas sebanyak 88 kasus, sektor pemerintahan 54 kasus, sektor pendidikan 40 kasus serta sektor sumber daya alam dan lembaga perbankan dengan masing-masing sama 35 kasus.



**Gambar 1. Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia**  
Sumber: ICW, diolah oleh DataIndonesia.id

Lembaga Transparency International juga merilis sebuah data terkait dengan persepsi korupsi di Indonesia. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan sebuah indeks yaitu Indeks Persepsi Korupsi dengan menggunakan rentang nilai dari 0 – 100. Semakin tinggi nilai IPK maka semakin bersih suatu negara dari kasus korupsi, begitu juga sebaliknya semakin rendah nilai IPK mengindikasikan tingginya kasus korupsi yang terjadi di negara tersebut. Hasilnya pada tahun 2022 dinyatakan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia menurun 4 poin dari 38 poin di tahun 2021. Nilai ini merupakan nilai terendah sejak delapan tahun terakhir dan sekaligus menjelaskan bahwa memburuknya persepsi masyarakat terhadap korupsi yang terjadi di lingkungan jabatan publik dan politis negara ini (Katadata.co.id, 2023).



**Gambar 2. Data Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia**  
Sumber: Transparency International, diolah oleh katadata.co.id

Buruknya persepsi masyarakat terhadap jabatan publik dan politis semakin berdasar ketika adanya oknum yang tersandung kasus korupsi di lingkungan lembaga penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara, seperti kejaksaan, hakim, kepolisian, ditjen pajak dan juga bea cukai. Kejadian ini tentu semakin menghilangkan kepercayaan publik ketika lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara di rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengutip tulisan yang dimuat di laman *Metrotvnews.com* (2023) menyatakan berdasarkan data ICW tahun 2022 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 42,727 triliun. Nominal ini tergolong sangat fantastis dalam kurun waktu satu tahun. Apabila besaran nominal tersebut digunakan untuk kepentingan publik tentu sebagian besar persoalan yang terjadi selama ini bisa dituntaskan dengan baik sehingga tidak ada lagi ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Berbicara mengenai keterkaitan korupsi dan perekonomian, ada beberapa penelitian yang mendalami kajian ini, seperti Rachmawati (2021) dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa korupsi membuat perekonomian negara menjadi lesu sebagai akibat dari penurunan investasi, rendahnya produktivitas dan kualitas barang serta jasa, disamping itu juga terjadi penurunan pendapatan melalui pajak yang akhirnya berdampak kepada peningkatan utang negara. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Damanik and Saragih (2023); Haqiqi and Putra (2020) bahwa secara umum korupsi memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu semakin bersih suatu wilayah dari korupsi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut begitu juga sebaliknya. Sementara hasil penelitian dari Lutfi et al., (2020) menyimpulkan bahwa korupsi memiliki efek yang negatif namun tidak signifikan, artinya korupsi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung akan tetapi lebih mengacu kepada inefisiensi dalam pengelolaan produksi dan sumber daya.

Apabila dilihat dari sudut pandang para pelaku, rata-rata oknum pelaku korupsi merupakan orang-orang yang berpendidikan atau berintelektual. Hal ini tentu bertentangan dengan latar belakang yang dimiliki oleh para oknum, dimana umumnya orang berpendidikan memiliki pemikiran yang lebih terbuka, maju serta bisa menimbang dan memilah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-undang sistem pendidikan No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang dikutip oleh Alfiyati (2017) menyatakan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga akan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu langkah awal yang harus dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai korupsi di lembaga pendidikan adalah dengan mengimplementasikan budaya anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan formal melalui kurikulum pembelajaran, terkhusus pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Karena menurut Pratama & Sumaryati (2015) peserta didik yang berada di tingkat ini berisikan remaja-remaja dalam masa transisi dan rentan terhadap perilaku menyimpang. Maka dari itu dengan pendidikan budaya anti korupsi diharapkan akan menjadi sebuah langkah preventif dalam membentuk karakter, moral serta pengetahuan mengenai korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak yang dihasilkan dari korupsi serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari praktek korupsi demi untuk menyelamatkan perekonomian bangsa (Kristiono et al., 2020); (Sulistiyawati et al., 2017); (Fatimah & Harmanto, 2021).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pemaparan materi mengenai budaya anti korupsi sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. Kegiatan ini juga didukung dengan penayangan sebuah video edukasi dalam bentuk contoh kasus serta diakhiri dengan sesi diskusi. Peralatan yang digunakan saat penyampaian materi berlangsung adalah laptop, proyektor, microphone, sound system, terminal listrik dan kamera. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 2 Mei 2023 di beberapa sekolah menengah atas atau sederajat yang berada di Tapaktuan.

Pemaparan materi ditujukan kepada peserta didik kelas XII, dikarenakan peserta didik SMA, MA dan SMK telah memiliki pola pikir yang jauh berkembang dibandingkan dengan peserta didik di bawahnya, ditambah dengan semakin terbentuknya karakter peserta didik sehingga mempermudah penyampaian materi dengan berbagai contoh kasus terkini. Alasan lain pemilihan ini juga diperkuat dengan akan merantauanya peserta didik ke berbagai kota untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi. Dengan kondisi yang jauh dari pengawasan terutama orang tua, penting bagi peserta didik untuk membekali diri supaya terhindar dari prektek-prektek korupsi agar tidak menjadi kebiasaan dimasa yang akan datang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum kegiatan inti dimulai, terlebih dahulu tim bertemu dengan kepala sekolah dan didampingi oleh guru mata pelajaran PKn dengan tujuan untuk mendengar sudah sejauh mana implementasi budaya anti korupsi diterapkan pada mata pelajaran di masing-masing sekolah. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan tim dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dan dengan harapan setelah kegiatan ini budaya anti korupsi semakin melekat di setiap peserta didik.



**Gambar 3. Tim berkoordinasi dengan perwakilan MA dan SKM Tapaktuan untuk mendengarkan implementasi budaya anti korupsi di sekolah**  
**Sumber: Dokumentasi Tim**

Hasil pertemuan ini memberikan gambaran kepada tim bahwa pada dasarnya masing-masing sekolah yang dikunjungi telah menerapkan budaya anti korupsi melalui mata pelajaran PKn. Meskipun begitu pihak sekolah juga menginginkan adanya diskusi yang disampaikan oleh pihak luar dalam bentuk seminar mengenai contoh praktek korupsi. Mengingat setelah ini peserta didik akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan kondisi lingkungan yang dihadapi pun jauh lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu pihak sekolah berharap setelah nanti peserta didik menyelesaikan studi dari masing-masing sekolah, peserta didik bisa menjaga diri dengan tidak mencoreng nama baik sekolah sendiri sebagai seorang alumni.

Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai budaya anti korupsi sebagai upaya dalam menyelamatkan perekonomian bangsa. Pada sesi pertama ini disampaikan mengenai pengertian tentang korupsi, kenapa korupsi bisa terjadi dan terus terjadi sampai-sampai korupsi itu sulit untuk dihilangkan. Dalam menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu pemateri menyampaikan bahwa korupsi itu pada dasarnya muncul dari keinginan seseorang untuk memperoleh kesenangan atau tujuan pribadi dengan cara yang instan tanpa memperdulikan resikonya. Namun kenyataannya, dalam mencapai tujuan tidak serta-merta bisa langsung diperoleh dengan cara yang instan, tentu ada yang namanya usaha dan juga pengorbanan, baik itu dari sisi materi, waktu, pikiran dan juga tenaga.



**Gambar 4. Penyampaian materi kepada peserta didik MA dan SMK Tapaktuan**  
**Sumber: Dokumentasi Tim**

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, pemateri menyampaikan setidaknya ada 5 hal mendasar yang mesti dimiliki setiap peserta didik untuk membekali diri agar terhindar dari praktek-praktek korupsi dan sekaligus menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Kelima hal tersebut yaitu dengan cara menanamkan sifat jujur, bertanggung jawab, keteguhan hati, disiplin, kesederhanaan dan kerja keras.

#### 1. Jujur

Secara bahasa kejujuran mempunyai arti kelurusan hati dan menjadi pondasi dari akhlak seseorang. Dengan memiliki sifat jujur seseorang akan mudah diterima baik oleh orang lain baik itu dari perkataan, sikap maupun tindakan. Implementasi kejujuran di lingkungan sekolah bisa dilihat dari tidak adanya kegiatan mencontek saat ujian berlangsung atau mengerjakan tugas hasil dari usaha sendiri tanpa mengambil punya orang lain.

#### 2. Bertanggung Jawab

Secara ringkas tanggung jawab memiliki arti pembebanan, yaitu sikap penerimaan diri terhadap sebuah perbuatan yang akan dan telah dilakukan. Seperti menerima amanah dari guru dan teman-teman lainnya untuk diangkat menjadi ketua kelas atau ketua OSIS di sekolah.

#### 3. Keteguhan Hati

Setiap individu harus mempunyai sikap keteguhan hati, artinya tidak mudah goyah dan terpengaruh dengan ajakan yang bersifat provokatif yang dapat memberikan dampak buruk terhadap diri sendiri. Sebagai contoh di lingkungan sekolah yaitu menolak ajakan teman untuk pulang sebelum waktunya, merokok atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu.

#### 4. Disiplin

Disiplin merupakan suatu sikap konsistensian seseorang dalam mentaati suatu peraturan tertentu. Sebagai seorang siswa wajib untuk mengikuti tata tertib yang telah dibuat oleh pihak sekolah, seperti datang tepat waktu, memakai seragam yang lengkap dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

## 5. Kesederhanaan

Seseorang harus menanamkan sikap kesederhanaan dalam diri, yaitu hidup sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan tidak bermewah-mewahan atau berlebihan, boros dan lebih mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan pribadi.

## 6. Kerja Keras

Kerja keras merupakan sebuah sikap bersungguh-sungguh dan pantang menyerah dalam mencapai sebuah tujuan. Contoh kerja keras dalam kehidupan di sekolah adalah belajar dengan sungguh untuk mencapai cita-cita dan menghargai setiap proses yang ada bahwa dengan berproses akan mengantarkan seseorang kepada jalan kesuksesan. "Tidak ada jalan pintas dalam memperoleh kesuksesan."

Selesai menyampaikan materi pada sesi pertama, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran video mengenai contoh kasus korupsi yang ada di lingkungan sekitar dan diakhiri dengan sesi diskusi. Harapan dari pemutaran video ini adalah peserta didik menjadi semakin paham tentang praktek-praktek korupsi disamping itu juga dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana awalnya korupsi itu bisa terjadi. Pada menit-menit akhir video dipaparkan dampak sosial ekonomi yang disebabkan oleh korupsi. Korupsi menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akibatnya masyarakat jauh dari kata sejahtera dan hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa. Kesejahteraan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa, ketika kesejahteraan masyarakat meningkat maka akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, dimana SDM ini nantinya akan menjadi penerus dalam memajukan bangsa pada segala bidang.



**Gambar 5. Pemateri dan tim menjawab pertanyaan siswa saat sesi diskusi**

**Sumber: Dokumentasi Tim**

Pada sesi diskusi muncul pertanyaan dari salah seorang siswa SMK mengenai apakah korupsi di Indonesia bisa hilang? Pertanyaan ini merupakan sebuah harapan dan juga sekaligus tantangan mengingat korupsi di Indonesia sudah sangat membudaya. Pertanyaan tersebut coba dijawab dari sudut pandang pemateri berdasarkan realita hari ini. Melihat korupsi yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan saat ini, pada dasarnya korupsi itu bisa dihilangkan walaupun membutuhkan waktu secara bertahap. Untuk mencapai Indonesia yang bebas dari korupsi, tentu pemerintah dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri, perlu

adanya peran dari setiap kalangan dalam upaya untuk memberantas korupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan budaya anti korupsi dan dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil misalnya lingkungan keluarga sampai kepada ruang lingkup yang lebih besar seperti lingkungan sekolah, kerja atau masyarakat. Selain itu perlu adanya undang-undang yang kuat mengenai ancaman hukuman terhadap para pelaku, mengingat hukuman yang berlaku saat ini tidak memberikan efek gentar sehingga para pelaku tidak pernah jera dalam melakukan tindak pidana korupsi. Apabila setiap kalangan ikut berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi ditambah dengan kuatnya ancaman hukuman pidana, maka bisa dipastikan korupsi itu akan hilang dari bangsa ini sehingga terwujudnya keadilan sosial bagi setiap rakyat Indonesia.

## KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia sudah menjadi sebuah budaya dan sulit untuk dihilangkan. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghapus praktek kegiatan korupsi, namun yang terjadi adalah sebaliknya kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya justru semakin meningkat. Hal ini membuat semakin buruknya kepercayaan masyarakat terhadap individu yang menduduki jabatan tertentu ditambah lagi kebanyakan para pelaku korupsi berasal dari orang-orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi sampai-sampai saat ini kualitas pendidikan di Indonesia menjadi bahan pertanyaan semua pihak.

Oleh karena itu untuk memutus akar budaya korupsi perlu dilakukan pendidikan budaya anti korupsi sejak dini terutama di lingkungan pendidikan. Sebab tujuan utama dari pendidikan selama ini lebih difokuskan kepada pembentukan intelektual masing-masing lulusan tanpa diikuti dengan penanaman karakter pendidikan anti korupsi. Pembentukan karakter ini sangat penting terutama pada jenjang sekolah menengah atas atau sederajat, mengingat pada masa ini peserta didik berada pada fase peralihan dari masa remaja ke masa dewasa dan membuatnya rawan dari tindakan yang menyimpang. Disamping itu pada fase ini peserta didik akan mulai memilih jalan dalam menentukan masa depannya masing-masing, maka dari itu harapannya dengan pembekalan karakter anti korupsi, setiap peserta didik akan menjadi pribadi yang lebih kuat serta tidak mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan negatif disamping juga ikut berkontribusi dalam rangka menyelamatkan perekonomian bangsa dengan mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyati, A. (2017) 'Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi Di SMA Negeri 6 Yogyakarta', *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(3), pp. 289–302.
- Damanik, D. and Saragih, M. (2023) 'Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN', *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), pp. 71–81. doi:10.36985/ekuilnomi.v5i1.494.
- DataIndonesia.id. (2023, Maret 21). ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

- Fatimah, E. and Harmanto, H. (2021) 'Penerapan Pendidikan Antikorupsi Melalui Kantin Kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo', *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(2), pp. 319–333. doi:10.26740/kmkn.v10n2.p319-333.
- Haqiqi, A.H. and Putra, H.A.D. (2020) 'Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), pp. 154–165. doi:10.31002/rep.v5i2.2325.
- Katadata.co.id. (2023, Februari 1). Indeks Presepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022. Retrieved from [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022)
- Kristiono, N., Astuti, I. and Uddin, H.R. (2020) 'Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pematang', *Integralistik*, 31(1), pp. 13–21.
- Lutfi, A.F., Zainuri, Z. and Diartho, H.C. (2020) 'Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN', *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 7(1), pp. 30–35. doi:10.19184/ejeba.v7i1.16482.
- Metrotvnews.com. (2023, Maret 3). Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 42,727 T. Retrieved from [metrotvnews.com: https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t](https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t)
- Pratama, A. and Sumaryati, S. (2015) 'Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta', *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), pp. 155–168. Available at: <http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/6273>.
- Rachmawati, A.F. (2021) 'Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), pp. 12–19.
- Sulistiyawati, S. et al. (2017) 'Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Di Dalam Lingkungan Keluarga Berbasis Pembentukan Karakter', *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 1–10.
- Amilia, A. A., Ans'harikhu, P., Bimantara, M. A. A., Suciani, L., Yanuar, A., & Rahmawati, P. (2020). Gerakan Ayo Kuliah Program Keluarga Harapan Untuk Memotivasi Siswa MELanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi. *Community Empowerment*, 05(03), 177–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/ce.3986>